

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

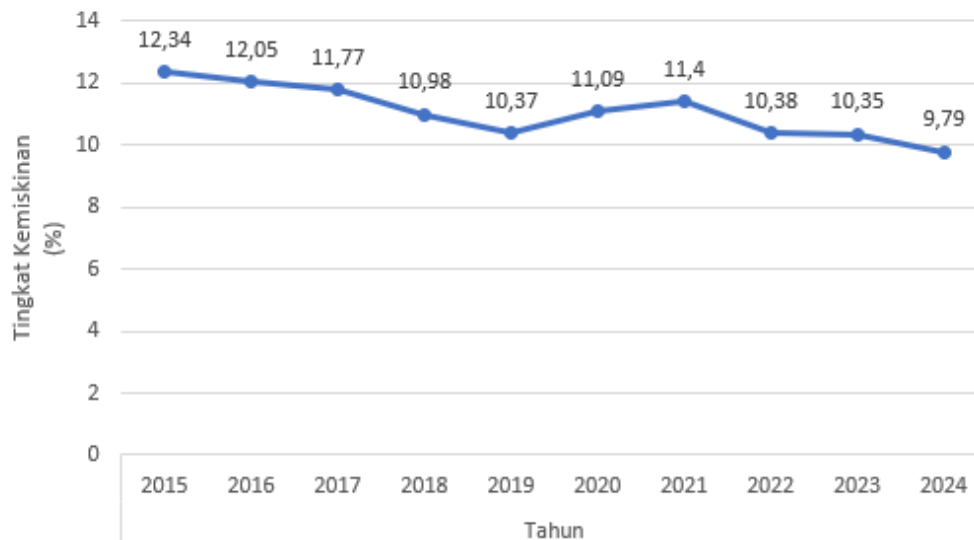
Kemiskinan merupakan hambatan utama bagi pengembangan perekonomian nasional. Indonesia adalah negara berkembang yang berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai program ekonomi dan sosial. Program-program ini meliputi inisiatif jaminan sosial, peningkatan infrastruktur, dan optimalisasi sumber daya manusia. Namun, langkah-langkah ini belum secara merata mengurangi kemiskinan di semua wilayah (Wau, 2022). Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang berarti bahwa tidak secara langsung manfaat pembangunan akan dibagikan secara adil. Ketidaksetaraan pendapatan dan sumber daya seringkali mendorong kelompok-kelompok sosioekonomi tertentu ke pinggiran masyarakat, yang membuat kemiskinan terus berlanjut meskipun ekonomi tumbuh (Todaro & Smith, 2020).

Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata lebih dari 5 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi telah lebih cepat daripada laju penurunan kemiskinan sebagian besar waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2024 sebesar 9,0 persen. Angka ini turun sedikit dari 9,4 persen pada Maret 2023. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih relatif lamban dan belum mampu memberikan kontribusi nyata secara merata yang meliputi seluruh segmen masyarakat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Afriliana & Wahyudi (2022), yang mengemukakan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih cenderung lebih dominan dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas,

sedangkan masyarakat berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan kemampuan memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi yang produktif.

Kondisi ketimpangan hasil pembangunan di tingkat nasional tersebut juga tercermin di tingkat provinsi. Sebagai salah satu wilayah penopang utama perekonomian nasional, Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan (Pamuji & Agustin, 2025).

Provinsi Jawa Timur adalah wilayah dengan kontribusi ekonomi yang menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Peran strategis tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai barometer laju perkembangan perekonomian nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 4,95 persen, yang berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 5,05 persen. Capaian tersebut belum diikuti oleh penurunan kemiskinan yang bersifat signifikan. Pada Maret 2024, persentase kemiskinan Jawa Timur tercatat sebesar 10,16 persen, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 9 persen. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan aksesnya belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan kawasan yang kurang maju.



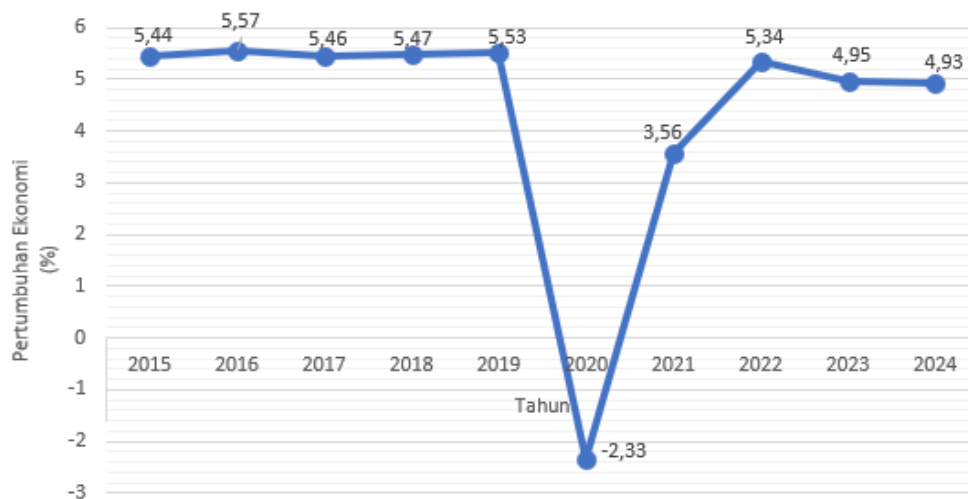
Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (2015-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, publikasi “Kemiskinan Jawa Timur 2015-2024” (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015 hingga 2024. Angka kemiskinan mengalami tren menurun dari 12,34 persen pada tahun 2015 turun menjadi 9,79 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara bertahap. Terlihat adanya kenaikan kembali pada tahun 2020 hingga 2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Pandemi tersebut menghambat kegiatan perekonomian, menurunkan pendapatan masyarakat, dan memperluas kerentanan sosial, sehingga kemiskinan sempat meningkat sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Teori kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Myrdal (1957) dalam karyanya *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, kemiskinan sering kali disebabkan oleh ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi yang menciptakan *vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan). Menurut

Todaro & Smith (2020) dalam buku *Economic Development* menjelaskan bahwa perkembangan perekonomian yang bersifat inklusif serta pemerataan pendapatan dapat berperan sebagai faktor penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sebab *output* dari pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Di Jawa Timur, tren penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai berdampak positif bagi masyarakat miskin, meskipun tetap dibutuhkan kebijakan berkelanjutan untuk memperkecil kesenjangan dan memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal seperti pandemi.



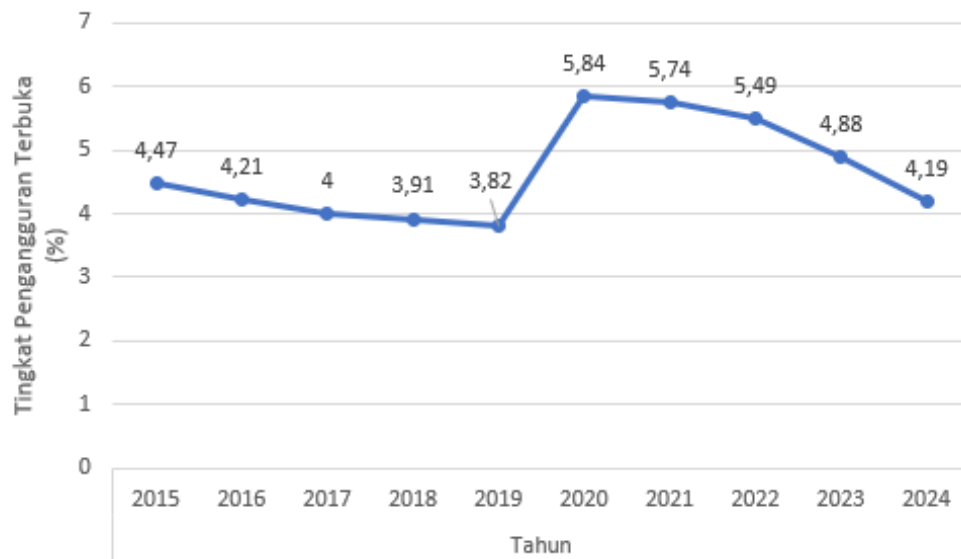
Gambar 1. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (2015-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, publikasi “Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2015-2024” (data diolah)

Gambar 1.2 merupakan dinamika perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015-2024, terlihat bahwa perekonomian daerah ini mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2015 hingga 2019, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang stabil pada kisaran 5,44 hingga 5,53 persen, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan berdaya saing. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi neoklasik

yang dikemukakan oleh Solow (1956), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dipengaruhi oleh proses akumulasi modal, peningkatan jumlah tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Kondisi stabil pada periode tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi di Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi yang cukup tajam dengan pertumbuhan mencapai sekitar -2,9 persen. Gangguan terhadap permintaan agregat, seperti yang timbul sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19, dapat menyebabkan penyusutan output serta tingkat pertumbuhan ekonomi (Board *et al.*, 2020).

Memasuki periode 2021 hingga 2024, ekonomi Jawa Timur kembali menunjukkan tren positif dan mengalami pemulihan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2021 dan berada di kisaran 5,3 persen pada tahun 2022, menandakan adanya fase *recovery* pasca-pandemi. Menurut Todaro & Smith (2020), proses pemulihan ekonomi di negara berkembang dipengaruhi oleh tingkat efektivitas suatu kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi investasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Jawa Timur mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi global dan domestik, sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dinamika tersebut mengilustrasikan penerapan teori-teori pertumbuhan ekonomi dalam konteks nyata, di mana faktor kebijakan, investasi, dan adaptasi struktural berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.



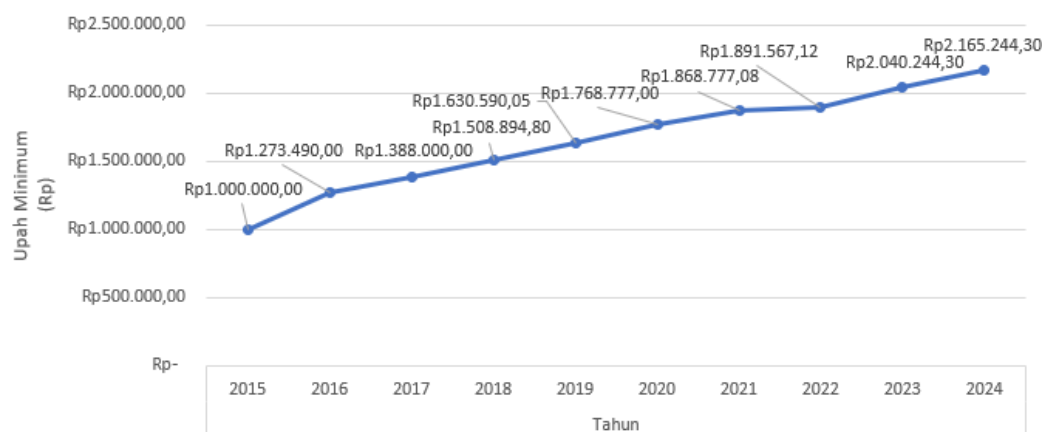
Gambar 1. 3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur (2015-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, publikasi “Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 2015-2024” (data diolah)

Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur tahun 2015-2024 mengindikasikan dinamika pasar tenaga kerja yang sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi daerah. Pada periode 2015 hingga 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kecenderungan berkurang dari 4,47 persen menjadi 3,82 persen. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil pada periode tersebut. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan output akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor modern, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran (Butkus *et al.*, 2022).

Terjadi lonjakan tingkat pengangguran pada tahun 2020 hingga mencapai 5,84 persen, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor produktif. Setelah periode tersebut, pada tahun 2021 hingga 2024, tingkat pengangguran kembali menurun secara bertahap seiring dengan pemulihan

ekonomi. Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bersifat negatif sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Okun (Okun Laws). Namun, pada penelitian Mohamed (2024) pada kasus Somalia menunjukkan bahwa meskipun arah hubungan tersebut negatif, pengaruhnya tidak signifikan, sehingga penurunan pengangguran tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga faktor struktural lainnya. Pola fluktuasi pengangguran di Jawa Timur mencerminkan keterkaitan erat antara dinamika ekonomi makro dan kinerja pasar tenaga kerja, di mana kebijakan pemerintah dan stabilitas ekonomi berperan penting dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.



Gambar 1. 4 Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur (2015-2024)

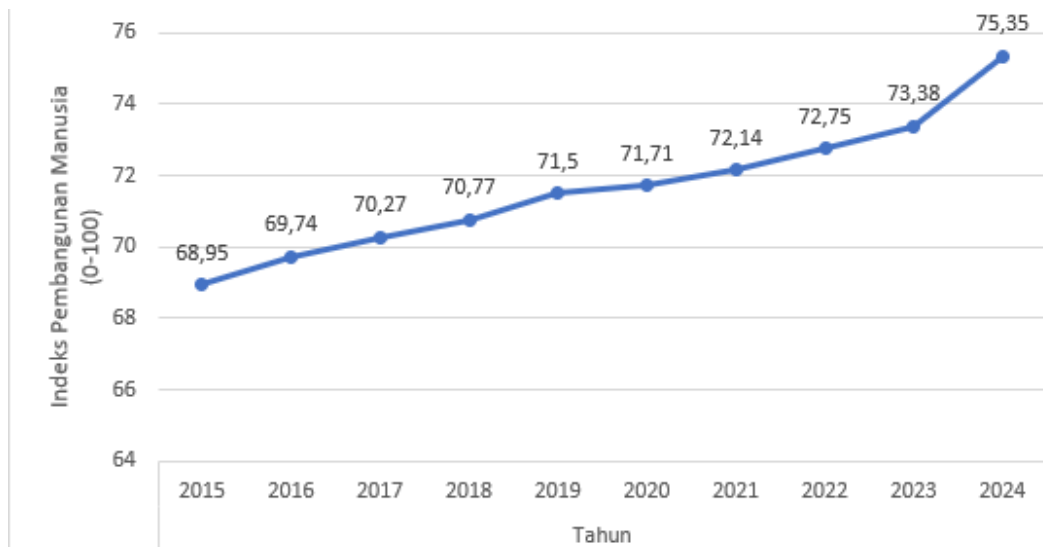
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, publikasi “Upah Minimum Jawa Timur 2015-2024” (data diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan upah minimum di Jawa Timur periode 2015-2024, yang menunjukkan kecenderungan kenaikan secara berkelanjutan setiap tahun. Pada tahun 2015, upah minimum masih berada di angka Rp 1 juta, dan terus mengalami peningkatan hingga melampaui Rp 2,1 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang menyesuaikan upah minimum berdasarkan perkembangan inflasi,

produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan (PP No 36, 2021).

Teori upah efisiensi (*Efficiency Wage Theory*) yang diperkenalkan oleh Solow (1979) dan Akerlof & Yellen (1990), peningkatan upah dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, serta loyalitas pekerja. Di Jawa Timur, kenaikan upah minimum secara bertahap dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja serta mengurangi persentase kemiskinan, karena daya beli masyarakat ikut meningkat. Berdasarkan teori pasar tenaga kerja klasik Smith (1776), upah dipengaruhi oleh dinamika antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaannya, di mana kenaikan upah mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan adanya pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Teori Keynes (1936), mengingatkan bahwa peningkatan upah yang terlalu cepat tanpa diimbangi produktivitas dapat menimbulkan tekanan terhadap biaya produksi dan berpotensi menghambat penyediaan kesempatan kerja. Kebijakan penetapan upah minimum di Jawa Timur perlu memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja serta kapasitas sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja. Tren kenaikan upah minimum di Jawa Timur menunjukkan arah positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap diperlukan pengelolaan kebijakan yang adaptif agar pertumbuhan upah sejalan dengan produktivitas dan stabilitas ekonomi daerah.



Gambar 1. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur 2015-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, publikasi “Indeks Pembangunan Manusia 2015-2024” (data diolah)

Gambar 1.5 memperlihatkan dinamika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur pada periode 2015-2024, yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang berkelanjutan setiap tahun. Pada tahun 2015, nilai IPM berada di angka 68,95 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 75,35 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kondisi kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Tren ini menggambarkan bahwa Jawa Timur mengalami kemajuan dalam aspek kualitas pembangunan manusia yang semakin tersebar secara adil dan berkesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang menilai tiga aspek pokok pembangunan manusia, yaitu meliputi usia harapan hidup yang tinggi sebagai indikator kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, serta kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Ghislandi *et al.*, 2018). Kenaikan IPM di Jawa Timur menandakan adanya peningkatan dalam

ketiga dimensi tersebut, yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah (Muslihatinningsih *et al.*, 2023).

Teori *Development as Freedom* menjelaskan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui perluasan kapabilitas manusia dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (Amartya sen, 1999). Dengan kata lain, peningkatan IPM mencerminkan meningkatnya kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif. Pembangunan manusia adalah tujuan utama pembangunan ekonomi, karena tingginya kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting sebagai faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Peningkatan IPM di Jawa Timur selama periode 2015-2024 mencerminkan hasil dari sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta upaya pemerintah daerah dalam memperkuat layanan publik. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi faktor kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berhasil menekan tingkat kemiskinan di bawah 5 persen berkat dominasi sektor industri dan jasa. Sebaliknya, wilayah madura seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep masih menghadapi tingkat kemiskinan di atas 15 persen. Penyebab utama pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menurunkan kemiskinan adalah ketimpangan struktur ekonomi. Daerah industri memiliki akses investasi,

infrastruktur, dan tenaga kerja yang lebih kompetitif dibandingkan daerah yang masih berorientasi pada sektor pertanian subsisten (Adilah *et al.*, 2025).

Tingkat pengangguran merupakan indikator krusial yang memengaruhi kemiskinan. Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2024), Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur tercatat sebesar 5,84 persen pada tahun 2020. Pengangguran tetap menjadi hambatan dalam upaya penurunan kemiskinan karena mayoritas angkatan kerja masih terserap pada sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar menjadi penyebab utama inefisiensi pada pasar tenaga kerja di Jawa Timur. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan lapangan kerja produktif (Jannah *et al.*, 2022).

Kondisi pengangguran yang tinggi dan adanya *mismatch* keterampilan di Jawa Timur menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di provinsi ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja, namun juga ditentukan oleh struktur pasar tenaga kerja yang belum efisien. Jawa Timur menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji lebih dalam karena provinsi ini merupakan salah satu pusat perekonomian nasional, namun masih menghadapi disparitas kesejahteraan yang tajam antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan daerah seperti Madura. Situasi tersebut menjadikan kebijakan upah minimum memiliki peran strategis dan kompleks dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi pasar tenaga kerja yang beragam dan ketimpangan pembangunan yang masih lebar, Jawa Timur menyediakan konteks yang tepat untuk memahami bagaimana interaksi antara tingkat pengangguran dan kebijakan upah dapat memengaruhi tingkat kemiskinan secara lebih mendalam.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk tahun 2024 berkisar antara Rp2.165.244 di Kabupaten Sampang hingga Rp4.725.479 di Kota Surabaya. Walaupun kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, hasilnya belum optimal. Kenaikan upah minimum tanpa peningkatan produktivitas justru dapat mengurangi daya saing industri kecil dan menengah, yang berdampak pada perlambatan penyerapan tenaga kerja baru. Artinya, kebijakan upah perlu disinergikan dengan strategi peningkatan produktivitas agar tidak menimbulkan efek samping terhadap tingkat kemiskinan (N. R. Maharani & Woyanti, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan dari 68,95 (2015) menjadi 75,35 (2024). Kesenjangan antar wilayah tetap tinggi. Kota Surabaya (83,74) jauh diatas Kabupaten Sampang (63,25). Peningkatan IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang baik cenderung lebih produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi (Endrawati *et al.*, 2023).

Keterkaitan antara variabel ekonomi makro dan kemiskinan dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Teori (Kuznets, 1955) menjelaskan adanya hubungan nonlinier antara laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, dimana pada fase awal pembangunan ketimpangan mengalami peningkatan, namun pada tahap lanjut menurun seiring pemerataan kesempatan ekonomi. Teori lingkaran setan kemiskinan menyoroti keterjebakan masyarakat dalam siklus rendahnya pendapatan, produktivitas, dan tabungan (Weyforth & Nurkse, 1955). Teori Todaro menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus mencakup dimensi kesejahteraan manusia melalui peningkatan pendidikan,

kesehatan, dan standar hidup. Teori efisiensi upah menjelaskan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas, tetapi jika tidak diimbangi produktivitas tenaga kerja, justru dapat menekan kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2020). Keempat teori ini menjadi dasar konseptual penelitian untuk menjelaskan keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, upah minimum, IPM, dan kemiskinan.

Studi terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Deby Oktaviana (2021), menemukan keterkaitan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, sedangkan Hardana *et al.*, (2023) menyatakan sebaliknya. Ayunin & Hapsari (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara Syahputri & Fisabilillah (2022) menunjukkan adanya efek ganda kebijakan upah terhadap kemiskinan. Penelitian yang memasukkan variabel IPM dalam model empiris masih terbatas, terutama di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengintegrasikan variabel laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersamaan menggunakan data panel kabupaten/kota Jawa Timur periode 2015-2024 dengan metode *Fixed Effect Model (FEM)*, untuk memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk memahami sejauh mana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kebijakan upah minimum, dan pembangunan manusia memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan data panel kabupaten/kota selama 2015-2024, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih tepat dan relevan bagi perumusan kebijakan daerah.

Hasil penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu Tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan ilmiah sekaligus acuan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkeadilan serta konsisten dalam jangka waktu panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2024?
5. Bagaimana pengaruh simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, upah minimum, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2024.
2. Menganalisis bagaimana tingkat pengangguran terbuka memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2015-2024
3. Menganalisis bagaimana upah minimum memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2015-2024.
4. Menganalisis bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2015-2024.
5. Menganalisis pengaruh simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, upah minimum, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur dan kajian empiris dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan determinan kemiskinan di tingkat daerah. Dengan mengintegrasikan variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan upah minimum, serta variabel sosial berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam satu model analisis berbasis data panel wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur, studi ini menyajikan kontribusi ilmiah terhadap pendalaman konsep yang lebih komprehensif terkait dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur. Temuan empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum, dan IPM dapat membantu pemerintah dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi makro dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.